

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Keberhasilan suatu perusahaan sangat memiliki pengaruh yang cukup besar pada pengelola suatu perusahaan dalam ini adalah manajemen suatu perusahaan selaku pemilik informasi terbesar dalam suatu perusahaan. Tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan dapat dinilai dari kemampuan seorang manajemen dalam menghasilkan laba dalam setiap periode. Ukuran kinerja suatu perusahaan merupakan sebuah informasi yang dibutuhkan oleh pihak pemangku kepentingan untuk mengambil suatu keputusan pada masa sekarang dan yang akan datang

Adapun pemangku kepentingan tersebut ialah terdiri dari pihak eksternal maupun internal suatu perusahaan, adapun pihak eksternal suatu perusahaan membutuhkan informasi kinerja dalam hal memberikan suntikan modal untuk mendapatkan imbal hasil yg lebih baik. Begitu juga dengan pihak internal yang menggunakan informasi kinerja sebagai pengambilan keputusan pada perusahaan.

Fenomena yang terjadi saat ini terjadinya pengkaburan informasi yang diperoleh pemangku kepentingan dalam hal ini adalah pihak eksternal sebagai akibat timbulnya penyalahgunaan laporan keuangan yang dikelola oleh manajemen suatu perusahaan, hal ini sejalan dengan teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh fenomena dari teori keagenan (*agency theory*) (Jensen dan Meckling, 1976) mengindikasikan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pihak internal dan pihak eksternal dapat mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan laporan keuangan.

Hal itu dikarenakan bagi pihak internal (manajemen) pentingnya laporan keuangan perusahaan untuk menunjukkan prestasi hasil kerja mereka dan menunjukkan kondisi yang baik terhadap pihak eksternal walaupun kondisi perusahaan sedang tidak baik sebagai tujuan untuk mempertahankan para investor agar tetap melakukan investasi kepada perusahaan. Sedangkan pentingnya laporan keuangan bagi pihak eksternal (investor, kreditor, pemilik, pemerintah, masyarakat) selaku pemakai laporan keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya pada saat ini sehingga dapat memprediksikan kondisi perusahaan masa depan yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

Masalah keagenan muncul karna adanya sikap perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak, yaitu manajer sebagai pihak internal yang mengelolah perusahaan dan pemilik perusahaan sebagai pihak luar yang menerima informasi dari internal perusahaan untuk mengambil suatu keputusan. Salah satu masalah keagenan muncul manakala manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan bonus dari *principal* (Watts and Zimmerman Halim dkk, 2005).

Menurut Ujiyantho & Pramuka (2007) dikutip dari Aditya Bayuputranto Aji (2012) **“bahwa masalah keagenan juga muncul karena keberadaannya sebagai pengelola perusahaan, manager sebagai agen lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham)”**.¹ Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang digunakan prinsip untuk memberikan intensif kepada agen. Agen yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan informasi yang kurang menguntungkan, sehingga menimbulkan informasi yang tidak simetris.

Informasi yang simetris akan dapat menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan, pengkaburan informasi yang diberikan oleh agen selaku pengelola informasi kepada pihak *principal* akan mengkaburkan kebenaran terhadap informasi tersebut, hal ini sejalan dengan teori konflik kepentingan antara Agen selaku pengelola perusahaan yang memiliki informasi terbesar terhadap sebuah perusahaan dengan *principal* selaku pihak diluar perusahaan yang menerima informasi dari agen.

Langkah yang dapat digunakan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, maka diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif dapat

¹ Ujiyantho & Pramuka, **Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kualitas Laba dan Manajemen Laba di Bursa Efek Indonesia**, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal. 13

mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda.

Dalam rangka menciptakan tatakelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara berkesinambungan, maka setiap perusahaan dianjurkan untuk melakukan pembentukan komite audit yang dapat melakukan pengendalian dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pemberian output yang berupa informasi keuangan kepada pihak-pihak berkepentingan. Adapun aturan yang dibuat oleh badan pengelolah BEI terkait dengan komite audit yang harus beranggotakan 30% anggota independen dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi.

Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi : melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik, melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik, memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya, memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal, melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi

pemantau resiko dibawah dewan komisiaris, menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik, menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisiaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik, dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Komite audit memberikan kontribusi bagi pengembangan rencana strategis perusahaan dengan memberikan masukan dan rekomendasi masukan dan rekomendasi kepada dewan berkaitan dengan masalah keuangan atau operasional. Dan oleh karena itu komite audit yang efektif akan berfokus pada peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan, terutama dalam lingkungan bisnis yang baik.

Keberadaan komite audit dipertegas dengan keputusan Bapepam (Badan Pengelola Pasar Modal) dalam surat edaran Bapepam No.3 tahun 2000 mengenai pembentukan komite audit dan keputusan direksi BEJ No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan dan pencatatan efek di bursa yang mencakup komisiaris independen, komite audit, sekertaris perusahaan, keterbukaan dan standart laporan keuangan pada masing-masing sektor.

Pedoman *good corporate governance* dipersiapkan dan disusun oleh *task force* komite audit yang dibentuk oleh komite audit nasional kebijakan *good corporate governance* dengan tujuan memberikan bimbingan kepada perusahaan indonesia dalam pembentukan suatu komite audit yang efektif, terutama berkaitan dengan ukuran, independensi, frekuensi pertemuan, dan kemampuan penguasaan anggota dibidang akuntansi dan keuangan. Seluruh perusahaan yang terdaftar diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi dalam hal karakteristik komite audit.

Dalam setiap *audit committee charter* yang dimiliki setiap masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah :

1. Laporan triwulan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan yang bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit.
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan pada umumnya. Rapat komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses tata kelola perusahaan yang baik dan sehat, memonitor perusahaan agar tunduk pada *Code dan Conduct*, mengerti semua pokok permasalahan perusahaan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial perusahaan atau non-finansial perusahaan, dan memonitor bahwa perusahaan tunduk

pada setiap peraturan undang-undang yang berlaku agar tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan informasi yang benar dalam pengambilan keputusan.

Komite audit yang independen memberikan meminimalisir dalam menghadapi tindakan *fraud* (kecurangan) yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab dalam hal ini adalah manajer selaku agen yang mengelolah perusahaan dan memeberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan. Semakin besar independensi komite audit perusahaan maka semakin rendah probabilitas kemungkinan terjadinya dalam manajemen laba dan akan memberikan infromasi laba yang berkualitas.

Menurut Aditya Bayuputranto Aji: **“faktor ukuran komite audit, komite audit independen dan pertemuan komite audit memberikan pengaruh terhadap manajemen laba namun tidak signifikan terhadap kualitas laba”**.²

Menurut Made Shinta Sekar Ayu: **“Kompetensi komite audit dan aktivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba”**.³

Sedangkan menurut Destika Maharani Putri: **“Karakteristik yang ada pada komite audit dalam hal ini yaitu independensi, ukuran, jumlah pertemuan, dan**

² Aditya Bayuputranto Aji, **Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Komite Audit Terhadap Kualitas Laba dan Manajemen Laba di Bursa Efek Indonesia**, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hal.8

³ Made Shinta Sekar Ayu, **Pengaruh Karakteristik Komite Audit dan Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.

keberadaan *financial expertise* pada komite audit tidak seluruhnya menunjukkan hubungan yang signifikan dengan manajemen laba”⁴

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada tidaknya pengaruh antara karakteristik komite audit terhadap manajemen laba, sehingga penelitian ini bertujuan untuk meluruskan antara ke tiga hasil penelitian tersebut apakah karakteristik komite audit memiliki hubungan terhadap manajemen laba.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba yang mengakibatkan pada kualitas laba?
- 2 Bagaimana pengaruh jumlah keanggotaan komite audit independen terhadap manajemen laba yang mengakibatkan pada kualitas laba?
- 3 Bagaimana pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap manajemen laba yang mengakibatkan pada kualitas laba?

⁴ Destika Maharani Putri, **Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba, Skripsi Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba**, Universitas Diponegoro, Semarang

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah Menganalisa pengaruh kinerja komite audit terhadap manajemen laba pada kualitas laba yang dihasilkan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut :

- a. Bagi pihak eksternal perusahaan agar dapat memperoleh keyakinan terhadap informasi yang benar sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat.
- b. Bagi pihak manajemen perusahaan sebagai dasar dalam pengawasan tindakan manajemen dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan yang taat pada peraturan yang berlaku.
- c. Bagi kalangan akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Landasan *theory agency* menjadi dasar dalam memberikan pemahaman terhadap permasalahan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Jaya, M Nur Fachruzi yang dikutip dari Briliano mengemukakan:

Pemisahan antara pihak pengelolah perusahaan dengan pihak pemilik perusahaan biasa terjadi pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang terdaftar di pasar modal, dan hubungan anatara pihak peneglolah atau manajemen perusahaan dan pemiliknya terkait dengan yang dinamakana teori keagenan.⁵

Sutedja yang dikutip dari Handoko mengemukakan:

Teori keagenan (*agency theory*) muncul pada tahun 1970'an sebagai reaksi atas bentuk korporasi yang memisahkan dengan tegas antara kepemilikan perusahaan dengan kontrol, atau dengan kata lain adanya pemisahan yang jelas

⁵ Jaya & Dilak Vaya Juliana, **Income Smoothing; Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, dan Umur Perusahaan**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom, Bandung, 2019, hal. 86

antara pemilik perusahaan dengan pihak manajemen. Dengan semakin kompleks dan besarnya perusahaan, pihak pemilik tidak dapat secara intensif mengelola perusahaannya, sehingga meminta pihak manajemen untuk mengelola perusahaan dalam usahanya untuk mendapatkan laba. Pada saat pemilik/pemegang saham atau prinsipal menunjuk manajer atau agen untuk bertindak sebagai pengelola dan pengambil keputusan bagi perusahaan, maka pada saat itulah hubungan keagenan muncul. Penunjukan ini berharap agar manajer mampu memaksimalkan kemakmuran pemilik/pemegang saham.⁶

Pandangan terhadap teori keagenan di landasai oleh beberapa ahli menurut (Jensen & Mackling (1976), hubungan keagenan adalah sebagai kontrak, dimana satu atau beberapa orang memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk melaksanakan sejumlah jasa dan mendelagasikan sebuah wewenang untuk mengambil keputusan kepada agen tersebut. Begitu juga pemahaman yang di asumsikan oleh Eisenhardt (1989) menjelaskan hubungan yang mencerminkan struktur dasar keagenan antara *principal* dan agen yang terlibat dalam perilaku yang kooperatif, tetapi memiliki perbedaan tujuan dan berbeda sikap terhadap resiko.

Berdasarkan asumsi perbedaan tujuan dan perbedaan sikap terhadap suatu resiko tersebut yang menjadi sebuah permasalahan yang menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan terhadap sebuah tujuan. Dimana pihak pemilik (*Principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, akan tetapi manajer sebagai agen termotivasi

⁶ Sutedja, **Pengungkapan (Disclosure) Laporan Keuangan Sebagai Upaya Mengatasi Asimetri Informasi**, Fakultas Ekonomi Universitas Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hal. 115

untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya yang salah satunya memperoleh investasi dari pihak diluar perusahaan.

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang di kehendaki. Masalah yang sering muncul adalah adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent* disebut dengan *agency problem* adapun penyebab terjadinya *agency problem* adalah *asymetric information*. *Asymetric information* adalah informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan *agent* yang dapat berakibat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*,

Zulfa Irawati mengemukakan:

Salah satu topik utama dalam hubungan keagenan adalah konflik kepentingan antara manajer, pemegang saham, kreditur, pemerintah, serikat buruh yang berusaha memaksimumkan pemenuhan kepentingan masing-masing yang sering kali berseberangan satu dengan yang lain.⁷

⁷ Zulfa, **Analisis Perataan Laba (Income Smooting): Faktor Yang mempengaruhinya Dan Pengaruhnya Terhadap Return Dan Resiko Saham perusahaan Go Publik Dibursa Efek Indonesia**, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017

Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan yang tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan resiko perusahaan. Hal ini menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan yang seragam mengenai suatu perusahaan. Pihak-pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih besar atau dalam bahasa lainnya informasi A1 terhadap suatu perusahaan, sedangkan pihak lainnya memperoleh informasi yang lebih sedikit. Dengan kata lain, perilaku manajer termasuk dalam perilaku penentuan struktur modal .

Infomasi yang lebih banyak yang dimiliki oleh seorang manajer dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan yang sesuai keinginan dan kepentingan yang diinginkan memaksimalkan profitabilitas pada dirinya. Sedangkan *principal* hanya memiliki informasi yang terbatas sehingga akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang tersedia.

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang di bandingkan pihak eksternal yang salah satunya adalah *principal* sebagai pemilik perusahaan. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal yang sebenarnya mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik perusahaan dan sinyal tersebut termasuk melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan yang disampaikan setiap tahun secara berkala.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip dalam Binti Masruroh Mengemukakan:

Adapun tindakan *agent* yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan yang menyatakan bahwa:

- 1. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.**
- 2. *Adverse Selection*, yaitu suatu keadaan dimana *Principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi yang telah diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.⁸**

Permasalahan adalah bahwa *Principal* tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat dan masalah pembagian resiko yang timbul pada saat *Principal* dan *agent* memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, *principal* dan *agent* mungkin memiliki prefensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko.

⁸ Binti Masruroh, **Studi Komparatif Perilaku Moral Hazard dan Adverse Selection pada Bank Umum dan Bank Umum Syari'ah di Indonesia**, Prodi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016, hal. 7

2.2 Manajemen Laba

Secara umum manajemen laba di defenisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintegrasikan atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *Stakeholders* yang ingin mengetahui kinerja kondisi perusahaan.

Diah Ayu Pertiwi yang dikutip dari Sugiri (1998) Mengemukakan:

Definisi *earnings Management* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Definisi Sempit

***Earnings management* dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi *earning management* dalam artian sempit ini di definisikan sebagai prilaku manajer untuk "bermain" dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*.**

2. Definisi Luas

***Earnings management* merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit di mana manajer**

bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.⁹

Menurut Alesa Heni Selviani (2017) dikutip dari Scott (2015) **manajemen laba adalah pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi, atau aksi nyata, yang mempengaruhi laba sehingga mencapai sasaran dengan melaporkan laba tertentu.¹⁰**

Sedangkan definisi dalam arti luas merupakan peningkatan/mengurangi keuntungan yang di laporkan dalam suatu unit dimana manejer memegang tanggung jawab penuh tanpa menimbulkan peningkatan/penurunan profitabiitas ekonomi dalam jangka pendek.

Gita Kinanti Mentari yang dikutip dari Sulistyanto (2008:6) mengemukakan:

Manajemen laba didefinisikan sebagai usaha dari manajer dalam suatu perusahaan untuk campur tangan atau mempengaruhi informasi-informasi yang ada dalam laporan keuangan yang mengarah untuk mengelabui para pemangku kepentingan yang ingin mengerti kondisi serta kinerja perusahaan.

Akuntansi manajerial bukan suatu keharusan, perusahaan memiliki kebebasan untuk membuatnya sesuai kebutuhan tidak ada badan atau pihak pengatur yang lain

⁹ Diah Ayu Pertiwi, **Analisis Pengaruh Earning Management Terhadap Nilai Perusahaan dengan Peranan Praktik Corporate Governance Sebagai Moderating Variabel**, Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hal. 26

¹⁰ Alesia Heni Selviani, **Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba**, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, 2017, hal. 10

yang memiliki kewenangan untuk mengatur apa yang harus dikerjakan. Karena akuntansi manajerial sepenuhnya merupakan pilihan, maka pertanyaan yang selalu muncul adalah, informasi apa yang berguna, dari pada informasi apa yang harus disusun.

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memberikan utilitas yang lebih tinggi, seperti bonus yang tinggi. Manajemen perusahaan memberikan bonus terbesar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang di laporkan setiap periode akuntansi.

Scott (2003:383) mengemukakan:

Terdapat beberapa pola atau bentuk pelaksanaan manajemen laba diantaranya yaitu :

1. Taking A Bath

Dalam pola ini, manajemen harus menghapus beberapa aktiva dan membebaskan perkiraan biaya yang akan datang pada laporan saat ini, selain itu manajemen juga harus melakukan *clear the desk* sehingga laba yang di laporkan pada periode yang akan datang meningkat.

2. Income Minimazation

Pola ini dilakukan saat probabilitas perusahaan sangat tinggi agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang dilakukan yaitu berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitan dan pengembangan.

3. Income maximization

Teknik ini dilakukan dengan cara memaksimalkan laba, tujuannya yaitu untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Tindakan ini juga dapat dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

4. Income Smoothing

Teknik ini dilakukan dengan cara membuat kebijakan yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi, contoh seperti pengakuan *revenue* atas pendapatan.

5. Timing Revenue dan Expenses Recognition

Teknik dilakukan dengan cara membuat kebijakan yang berkaitan dengan *timing* suatu transaksi, contohnya seperti pengakuan prematur atas pendapatan.

Manajemen laba lebih banyak didefinisikan sebagai upaya yang harus dilakukan oleh seorang manager perusahaan dalam mempengaruhi informasi pada laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui bagaimana kinerja perusahaan saat ini. Menurut Scott (2003) terdapat motivasi yang terdapat dalam manajemen laba yaitu:

1. Motivasi harapan bonus

Dalam sebuah perjanjian bisnis, para pemegang saham akan memberikan sejumlah insentif dan bonus sebagai sebuah timbal balik (*feedback*) atas kinerja dari seorang manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif seperti ini akan diberikan dalam jumlah yang relatif tetap dan rutin. Sementara untuk bonus yang relatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manajer sudah berada di area pencapaian bonus yang sudah ditetapkan oleh para pemegang saham.

2. Motivasi hutang

Selain dengan cara melakukan kontrak bisnis dengan para pemegang saham untuk kepentingan ekspansi perusahaan, manager juga seringkali harus melakukan beberapa kontrak kerjasama bisnis dengan pihak ketiga, dan dalam hal ini adalah pihak kreditur. Agar kreditur bersedia untuk menginvestasikan dananya di perusahaan, tentunya seorang manager harus menunjukkan performa yang lebih baik dari perusahaannya. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, yaitu berupa pinjaman dalam jumlah yang lebih besar, perilaku kreatif dari seorang manager untuk menampilkan performa yang terbaik dari laporan keuangannya pun sering kali akan muncul.

3. Motivasi seputar perpajakan

Tindakan melakukan manajemen laba juga tidak hanya terjadi pada perusahaan yang sudah *go-public* saja dan bukan selalu untuk sekedar

kepentingan harga saham. Namun juga untuk kepentingan perpajakan. Kepentingan seperti ini akan lebih didominasi oleh perusahaan yang masih belum *go-public*. Perusahaan yang belum *go-public* lebih cenderung akan melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba fiskal yang lebih rendah daripada nilai yang sebenarnya. Kecenderungan seperti ini semakin memotivasi pihak manajer untuk bertindak lebih kreatif dalam hal melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang sudah dilaporkan memang lebih rendah tanpa harus melanggar peraturan dan kebijakan perpajakan.

4. Motivasi pada *initial public offering* (IPO)

Motivasi ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan yang akan *go-public*. Perusahaan yang akan *go-public* akan melakukan penawaran saham perdananya kepada publik atau *initial public offering (ipo)* untuk memperoleh tambahan modal usaha dari para calon investornya. Begitu pula dengan perusahaan yang sudah *go-public* untuk kelanjutan dan ekspansi dari usahanya.

5. Motivasi pergantian direksi perusahaan

Praktek dalam manajemen laba biasanya akan terjadi pada sekitar periode pergantian direksi atau *chief executive officier (ceo)*. Menjelang berakhirnya masa jabatan, seorang direksi lebih cenderung akan bertindak lebih kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya masih tetap terlihat baik menjelang tahun dia berakhir dia menjabat. Motivasi utama yang

sering kali sebagai pendorong hal tersebut adalah untuk memperoleh bonus yang lebih maksimal pada setiap akhir masa jabatannya.

6. Motivasi yang bersifat politis

Motivasi yang seperti ini paling sering terjadi pada perusahaan yang besar yang bidang usahanya lebih banyak menyentuh masyarakat luas, seperti perminyakan, gas, listrik, dan air. Demi menjaga agar bisa tetap mendapatkan subsidi, maka perusahaan-perusahaan tersebut lebih akan cenderung akan selalu menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu, sehingga prestasi atas kinerjanya tidak terlalu baik karena jika sudah baik, maka kemungkinan besar subsidi akan dicabut dan tidak mungkin akan diberikan lagi.

2.3 Kualitas Laba

Jadongan Sijabat (2016:38) mengemukakan:

Manajemen laba merupakan tindakan mengatur pendapatan, beban, keuntungan, atau kerugian agar mencapai informasi laba tertentu yang diinginkan, tanpa melanggar ketentuan dalam standar akuntansi.¹¹ Kualitas laba menjadi sangat penting karena dapat dipengaruhi oleh manajemen laba. Oleh karena itu kualitas laba dapat diindikasikan sebagai kemampuan informasi laba memberikan respon kepada pasar, dengan kata lain laba yang dilaporkan memiliki kekuatan respon (*power of respons*).

¹¹ Jadongan Sijabat, **Akuntansi Keuangan Menengah 1 Berbasis PSAK**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2016, Hal. 38

Informasi laba yang di hasilkan dan di laporkan oleh seorang manajemen dalam suatu laporan keuangan haruslah mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan memberikan utilitas dalam pengambilan keputusan yang tepat bagi para pemangku kepentingan, sehingga ketika informasi laba yang di hasilkan dapat memberikan dampak atau pengaruh yang benar terhadap hasil dari pengambilan keputusan maka informasi laba tersebut dapat dikatakan berkualitas.

Ada beberapa hal yang menyebabkan respon pasar yang berbeda-beda terhadap laba, yaitu adalah persistensi laba, beta, struktur permodalan perusahaan, kualitas laba, *Growth Opportunities*, dan *Informativeness of price* (Scott, 2000). Nilai ERC diprediksi lebih tinggi jika laba perusahaan lebih persisten dimasa depan. Demikian juga jika kualitas laba semakin baik, maka diprediksi nilai ERC akan semakin tinggi.

2.4 Komite Audit

Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* secara menyeluruh dan konsisten merupakan hal yang bersifat fundamental bagi organisasi. Salah satu unsur kelembagaan dalam kerangka *Good Corporate Governance* yang diharapkan mampu memberikan kontribusi tinggi dalam penerapannya adalah komite audit. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan.

Marta Utama (2004:64) mengemukakan:

Komite audit merupakan salah satu dari beberapa komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Telah diketahui secara umum bahwa untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, Dewan Komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite. Komite-komite yang pada umumnya dibentuk adalah Komite Kompensasi/Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, Komite Nominasi, dan Komite Audit.¹²

Dalam tataran praktis, figur anggota komite audit yang mampu menjalankan tugas kesehariannya secara efektif tidak mudah ditemukan. Perlu kriteria khusus bagi seseorang yang akan menjabat sebagai komite audit, mengingat tugas dan tanggung-jawab yang sangat strategis. Tugas komite audit erat kaitannya dengan penalaan terhadap resiko yang di hadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan komite audit sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam membantu penerapan *Good Corporate Governance* yang memiliki independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan bagi suatu organisasi yang bersangkutan.

2.5 Efektifitas Komite audit

Pemerintah melalui badan regulasi telah mengeluarkan peraturan nomor IX.15 lampiran keputusan tersebut tertuang dalam BAPEPAM dan LK nomor: Kep-

¹² Marta Utama, **Komite Audit, Good Corporate Governance dan Pengungkapan Informasi**, Departemen Akuntansi, Universitas Indonesia, 2004, Hal. 64

643/BL/2012 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Keberhasilan kinerja komite audit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya merupakan indikasi ke efektifan fungsi komite audit yang meliputi empat faktor, diantaranya :

1. Komposisi : keahlian, independensi, integritas dan objektivitas.
2. Otoritas : pertanggungjawaban dan pengaruh terhadap manajemen dan auditor.
3. Sumber daya : Kecukupan jumlah anggota, akses kepada manajemen, internal dan eksternal auditor, dan
4. *Diligent* : insentif dan motivasi ketekunan.

Menurut komite nasional kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2002) komite audit adalah suatu komite audit yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit.

Bursa Efek Indonesia melalui Kep. Direksi BEJ No. Kep315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Peran komite audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada dewan komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002). Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, mengidentifikasi

halhal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dewan komisaris.

Dikutip dari *Audit Commite Charter*, dalam menjalankan fungsinya komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang tertuang dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 55/POJK.04/2015 paling sedikit meliputi :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik, dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, komite audit mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi emiten atau perusahaan publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan akuntan terkait tugas dan tanggung jawab komite audit.
- c. Melibatkan pihak independen diluar anggota komite audit yang di perlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan), dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh dewan komisaris.

Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam *audit comitee charter*. *Audit Comitee charter* merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan pengawasan yang baik dalam perusahaan. Emiten atau perusahaan publik wajib memiliki piagam komite audit.

Adapun piagam komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 peraturan Otoritas jasa keuangan nomor 55/POJK.04/2015:

- a. Tugas dan tanggung jawab serta wewenang.
- b. Komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan.

- c. Tata cara dan prosedur kerja.
- d. Kebijakan penyelenggaraan rapat.
- e. Sistem pelaporan kegiatan.
- f. Ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan.
- g. Masa tugas komite audit.

Adapun anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak eksternal perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelolah perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab secara efektif. Salah satu alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan.

Dalam setiap audit *committee charter* yang dimiliki oleh masing-masing anggota, komite audit akan mengadakan rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh komite audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan

Komite Audit juga dapat mengadakan rapat eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas rapat komite audit ini kepada dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, pengantian dan pemberhentian perikatannya.

Maka dapat disimpulkan tentang nilai fungsi audit internal dan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal.

Rapat komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance* memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *Corporate governance* memonitor bahwa perusahaan tunduk pada *Code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non finansial perusahaan, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	Siti Eunur Rokhmah	Pengaruh asimetri Informasi, Ukuran perusahaan, dan mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap manajemen laba studi empiris pada perusahaan manufaktur yg terdaftar di bej 2010-2012	Variabel dewan komisaris independen, Pengaruh kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan	Menyatakan bahwa asimetri informasi memiliki pengaruh terhadap manajemen laba
2	Dwi Rahma Indella, Husnaini	Efektif Komite Audit, kualitas Auditor Eksternal dan kemungkinan kecurangan Pelaporan keuangan.	Independensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit, keahlian keuangan komite audit, diversitas komite audit, etnisitas komite audit, kualitas Auditor Eksternal	Independensi komite audit, jumlah rapat pertemuan komite audit, keahlian keuangan komite audit, Diversitas gender berpengaruh negatif terhadap pelaporan keuangan

3	Prawita Mandegha Rani	Pengaruh kinerja komite audit terhadap manajemen laba (Dengan menggunakan <i>earning restateman</i> sebagai proksi dari manajemen laba.	Independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian keuangan komite audit, jumlah pertemuan komite audit.	Independensi komite audit, ukuran komite audit, dan keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap proksi manajemen laba.
---	-----------------------	---	--	--

2.6 Kerangka berpikir

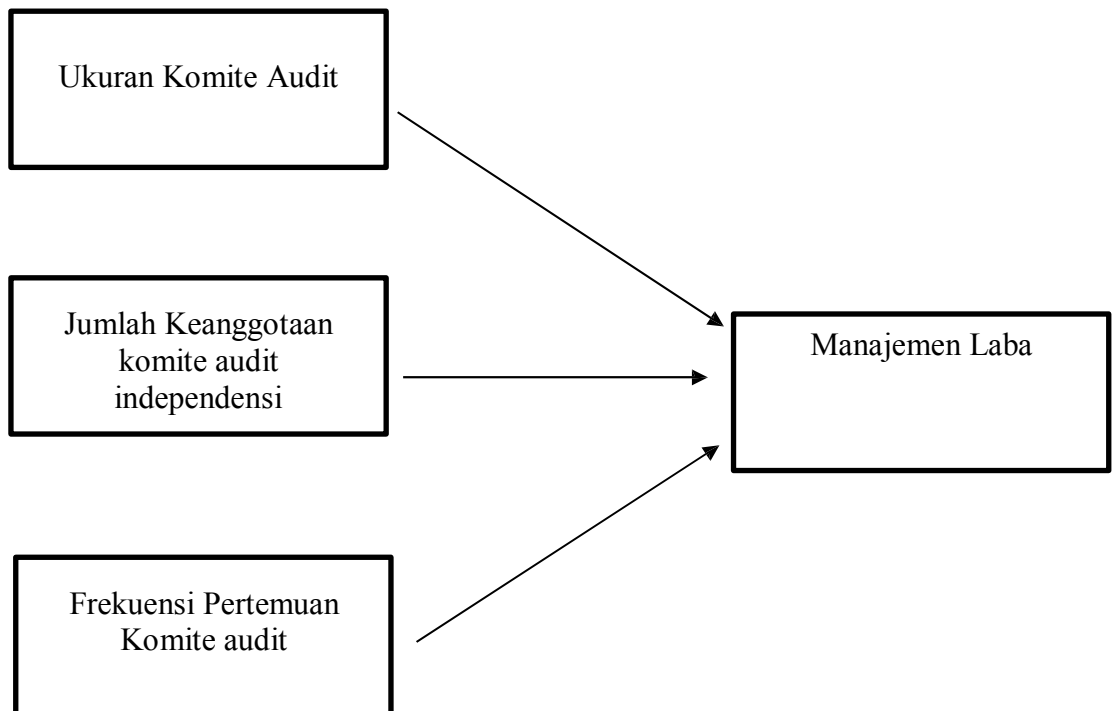
Manajemen laba merupakan suatu tindakan perencanaan terhadap laporan laba yang disusun oleh seorang manajemen, tindakan manajemen laba terjadi karena adanya konflik kepentingan antara agen dengan *principal* sehingga timbul suatu tindakan untuk mengatur laporan laba dengan metode akuntansi tertentu.

Informasi laba yang diperoleh seorang *principal* dari manajemen dapat berpengaruh secara signifikan terhadap pengambilan keputusan, oleh karenanya dibuat suatu badan yang independen dan memiliki integritas yang kuat dalam melakukan pemeriksaan terhadap informasi laba yang diberitakan oleh manajemen. Badan tersebut adalah komite audit, komite audit yang akan menilai kualitas informasi laba yang diberikan. Adapun yang menjadi kriteria terhadap seorang komite audit dalam menjalankan tugasnya seperti jumlah komite audit, persentase komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit yang akan menjadi variabel independen dan mempengaruhi terhadap tindakan manajemen laba sebagai variabel independen.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

VARIABEL INDEPENDEN

VARIABEL DEPENDEN



2.7 Pengembangan Hipotesis

A. Hubungan Ukuran komite audit terhadap manajemen laba

Manajemen laba merupakan salah satu bentuk akibat adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi dalam teori agensi. Hal ini dikarenakan manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Kehadiran *good corporate governance* diharapkan dapat menciptakan iklim tata kelola yang baik dan lebih transparan. *Good corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

Menurut Thomas S. Kaihatu (2006) dikutip dari Monks (2003) ***Good corporate governance (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholder.***¹³ Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan,

¹³ Kaihatu S. Thomas, **Good Governance dan Penerapannya di Indonesia**, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 2003, Hal. 2

kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Tujuan utama dari *good corporate governance* adalah untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. Bahwa efektivitas Komite Audit meningkat ketika ukuran komite bertambah, karena memiliki sumber daya lebih untuk ditujukan pada isu atau masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua *stakeholder*, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Komite audit dan komisaris independen merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas).

Menurut Adanan Silaban & Meilinda Stefani Harefa (2019:3)
“Suatu sistem pengendalian merupakan seperangkat sistem formal

maupun informal yang dapat membantu manajemen dalam mengarahkan organisasi dalam mewujudkan tujuannya.”¹⁴

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik komite audit.

B. Hubungan Jumlah Komite audit independensi terhadap manajemen laba

Pedoman pembentukan komite audit telah mengatur tentang jumlah minimum anggota komite audit, yaitu tiga orang. Dan menurut KNKG, untuk membangun komite audit yang efektif, rentang jumlah anggota yang diperlukan adalah 3-5 orang, karena komite audit yang terlalu kecil akan mengalami kesulitan dalam pendistribusian kerja.

Keanggotaan komite audit diatur dalam surat keputusan direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-315/BEI/062000 bagian C, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Sedangkan anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen dimana sekurang-kurangnya

¹⁴ Adanan Silaban & Stefani Meilinda Harefa, **Sistem Pengendalian Manajemen**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2019, hal.3

satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Komite audit bertugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dalam perusahaan, sehingga keberadaan komite audit dalam perusahaan akan memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba. Pengawasan pada audit eksternal diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor sehingga dapat memperbaiki efektivitas audit. Oleh karena itu, keberadaan komite audit yang cukup independen dapat membantu dalam mengurangi aktivitas manajemen laba. Proporsi anggota komite audit independen berpengaruh negatif terhadap *earning management*. Semakin tinggi persentase anggota independen maka semakin kecil *earning management* yang dilakukan oleh perusahaan

C. Hubungan Frekuensi Pertemuan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba

Bapepam (2004) menghendaki bahwa komite audit mengadakan rapat dengan frekuensi yang sama dengan ketentuan minimal frekuensi rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Ketika komite audit lebih banyak melakukan pertemuan dan lebih independen, manajer kemungkinan tidak menaikkan laba. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa melalui pertemuan dan pengamatan secara langsung, komite audit diharapkan dapat mengurangi tingkat manajemen laba.

Pertemuan dalam komite audit minimal dilakukan empat bulan sekali dan berdiskusi tentang laporan keuangan dengan auditor eksternal. Bapepam (2004) mensyaratkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk melakukan pengujian terhadap hipotesa seperti berikut ini:

H₁ : Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

H₂ : Jumlah komite audit independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

H₃ : Frekuensi pertemuan komite audit independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Defenisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel untuk melakukan analisis data. Adapun variabel tersebut adalah variabel terikat (*Dependent variabel*) dan variabel bebas (*Independet Variabel*). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah manajemen laba dan sebagai variabel bebas dalam penelitian ini adalah komite audit yang terdiri dari ukuran komite audit, independensi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit.

Variabel dependen merupakan variabel terikat terhadap variabel independen yang mempengaruhinya. Jadi perubahan pada posisi variabel terikat sangat dipengaruhi variabel bebas. Sedangkan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, jadi posisi variabel bebas dapat mempengaruhi posisi variabel terikat yang dipengaruhi. Pengertian variabel dependen juga disebut variabel output, kriteria, atau konsekuensial. Hal itu adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas. Sedangkan variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menyebabkann perubahan pada faktor yang diukur atau yang dipilih dalam mengetahui hubungan antara fenomena yang diamati.

1. Manajemen Laba (Variabel terikat)

Manajemen Laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi terhadap proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba. Pengukuran manajemen laba menggunakan *discretionary accrual* (DAC). Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat di manipulasi oleh manajer. *Discretionary accrual* menggunakan komponen akrual dalam mengatur laba karena menggunakan komponen akrual tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga dalam mempermainkan komponen akrual tidak disertai kas yang diterima/dikeluarkan. Untuk mengukur DAC, terlebih dahulu akan mengukur total akrual.

Model pengukuran atas akrual pada penelitian ini dihitung dengan menggunakan *Modified Jones Model* (Dechow *et al.*, 1995) yang dikutip dari Nohan Saputra (2012:36) dengan langkah-langkah sebagai berikut:

$$T_{it} = N_{it} - CFO_{it}$$

Nilai *Total Accrual* (TAC) yang di estimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*) sebagai berikut:

$$T_{it}/A_{it-1} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta rev_t / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_t / A_{it-1}) + e$$

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai n

Non Discretionary Accrual (NDA) dapat dihitung dengan rumus:

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 (\Delta rect / A_{it-1}) + \beta_3 (PPE_t / A_{it-1})$$

Selanjutnya *Discretionary Accrual* (DA) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$DA_{it} = TA_{it}/TA_{it-1} - NDA_{it}$$

Keterangan:

DA_{it} = *Discretionary accrual* perusahaan i pada periode ke t.

NDA_{it} = *Non discretionary accrual* perusahaan i pada periode ke t.

TA_{it} = Total akrual perusahaan i pada periode ke t.

N_{it} = Laba bersih perusahaan i pada periode ke t.

CFO_{it} = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t.

A_{it} = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1.

Δrev_t = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t.

PP_{Et} = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t.

$\Delta rect$ = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t.

e = *error*.

2. Komite Audit (Variabel Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat secara positif atau negatif. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Corporate Governance* yang terdiri dari ukuran komite audit, independensi komite audit dan frekuensi pertemuan audit.

3. Ukuran Komite Audit

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan, bahwa pentingnya tata kelola perusahaan yang baik digunakan untuk mengendalikan perusahaan sehingga principal membentuk komite audit yang bertanggung jawab untuk memastikan laporan keuangan yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang sebenarnya.

Ukuran komite audit memberikan ukuran penilaian terhadap kualitas yang dimiliki ketua dan anggota di komite audit yang akan dibentuk, semakin tinggi kualitas yang dimiliki maka semakin besar ukuran komite audit independen yang kompeten dalam memberikan penilaian terhadap kualitas informasi yang di audit. Adapun indikator penilaian terhadap kualitas yang dimiliki meliputi : keahlian komite audit.

Dimensi	Kode	Keterangan	Penilaian	Skor
<i>Composition</i>	ACEXP	Keahlian	<i>Expert</i>	1
		Komite audit	<i>Non Expert</i>	0

4. Independensi Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, independensi dari setiap anggota diukur dengan persyaratan :

- a. Bukan merupakan orang dalam badan yang memberikan jasa audit, non-audit dan konsultasi kepada perusahaan .
- b. Bukan merupakan eksekutif manajemen .
- c. Tidak memiliki saham perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung .
- d. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan komisaris maupun dengan direksi .
- e. Tidak memiliki hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha perusahaan.

Independensi dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan. Independensi komite audit pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit.

Independensi komite audit (ACINDP) diperoleh dari perhitungan :

$$\text{ACINDP} = \frac{\text{Jumlah anggota dependen} - \text{Jumlah anggota independen}}{\text{Jumlah anggota}}$$

5. Frekuensi Pertemuan Komite audit

Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan (KNKG, 2002). Jadi variabel frekuensi pertemuan komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

(Sumber: Situs Resmi IDX)

3.2 Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki (Sekaran, 2000). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI) dari tahun 2019-2020.

Sampel adalah bagian dari populasi (elemen-elemen populasi) yang dinilai dapat mewakili karakteristiknya (Indriantoro dan Supomo, 1999). Dalam penelitian ini sampel merupakan pasangan antara perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara keuangan. Penentuan sampel akan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2019 – 2020.
- b. Perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode penelitian memiliki jumlah komite audit independen yang lengkap dan memiliki data frekuensi pertemuan komite audit selama periode penelitian.
- c. Perusahaan yang tidak memiliki data laporan komite audit yang lengkap dikeluarkan dari sampel.
- d. Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam menyusun laporan tahunan.

Dengan penerapan kriteria diatas, maka ditetapkan sampel sejumlah 39 sampel di Bursa Efek Indonesia mulai tahun 2019-2020.

Tabel 3.2
Daftar Sampel Penelitian

No.	Kode	Daftar Perusahaan Manufaktur	2019	2020	Kriteria				Sample
					A	B	C	D	
1	ICBP	PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	53,3	0,5	√	X	X	√	
2	INDF	PT. Indofood Sukses Makmur Tbk	7,6	0,2	√	X	X	√	
3	MYOR	PT. Mayora Indah Tbk	3,9	13,1	√	√	X	√	
4	CMRY	PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk	45,1	58,2	√	√	√	√	Sampel (1)
5	GOOD	PT. Garudafood Putra Putri Jaya Tbk	3,8	4,4	√	√	√	√	Sampel (2)
6	MLBI	PT. Multi Bintang Indonesia Tbk	53,9	6,5	√	√	√	√	Sampel (3)
7	ULTJ	PT. Ultra Jaya Milk Industry & Trading Company Tbk	64,4	0,2	√	X	X	√	
8	PANI	PT. Pratama Abadi Nusa Industri Tbk	3,4	5,7	√	√	√	√	Sampel (4)
9	STTP	PT. Siantar Top Tbk	14,9	22,5	√	√	√	√	Sampel (5)
10	DMND	PT. Diamond Food Indonesia Tbk	7,1	18,5	√	√	√	√	Sampel (6)
11	ROTI	PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk	7,9	2,7	√	√	X	√	
12	CLEO	PT. Sariguna Primatirta Tbk	62,4	22,5	√	√	√	√	Sampel (7)
13	ADES	PT. Akasha Wira International Tbk	22,6	11,9	√	√	√	√	Sampel (8)
14	PSGO	PT. Palma Serasih Tbk	39,7	0,8	√	X	X	√	

15	DLTA	PT. Delta Jakarta Tbk	22,1	0,2	√	X	X	√	
16	TRGU	PT. Cerestar Indonesia Tbk	55,7	61,2	√	√	√	√	Sampel (9)
17	KEJU	PT. Mulia Boga Raya Tbk	41,7	26,9	√	√	X	√	
18	WMUU	PT. Widodo Makmur Unggas Tbk	41,1	101,3	√	√	√	√	Sampel (10)
19	CAMP	PT. Campina Ice Cream Industry Tbk	25,9	77,9	√	√	X	√	
20	HOKI	PT. Buyung Poetra Sembada Tbk	69,8	71,2	√	X	X	√	
21	BUDI	PT. Budi Starch & Sweetener Tbk	26,9	19,8	√	√	X	√	
22	PMMP	PT. Panca Mitra Multiperdana Tbk	54,1	67,4	√	√	√	√	Sampel (11)
23	IBOS	PT. Indo Boga Sukses Tbk	36,7	47,9	√	√	√	√	Sampel (12)
24	SKBM	PT. Sekar Bumi Tbk	27,9	35,1	√	√	X	√	
25	AISA	PT. FKS Food Sejahtera Tbk	5,7	0,4	√	X	X	√	
26	ALTO	PT. Tri Banyan Tirta Tbk	54,7	55,4	√	√	√	√	Sampel (13)
27	TAYS	PT. Jaya Swarasa Agung Tbk	23,1	97,3	√	√	√	√	Sampel (14)
28	BOBA	PT. Formosa Ingredient Factory Tbk	56,2	45,1	√	√	√	√	Sampel (15)
29	GULA	PT. Aman Agrindo Tbk	42,4	67,5	√	√	√	√	Sampel (16)
30	COCO	PT. Wahana Interfood Nusantara Tbk	53,4	86,9	√	√	X	√	
31	AMMS	PT. Agung Menjangan Mas Tbk	21,4	77,6	√	√	√	√	Sampel (17)
32	PSDN	PT. Prasadha Aneka Niaga Tbk	59,6	83,2	√	√	√	√	Sampel (18)
33	ENZO	PT. Morenzo Abadi Perkasa Tbk	43,5	67,2	√	√	X	√	
34	NASI	PT. Wahana Inti Makmur Tbk	6,2	0,7	√	x	X	√	
35	FOOD	PT. Sentra Food Indonesia Tbk	44,7	88,2	√	√	√	√	Sampel (19)
36	IKAN	PT. Era Mandiri Cemerlang Tbk	56,7	33,8	√	√	√	√	Sampel (20)
37	BTEK	PT. Bumi Teknokultura Unggul Tbk	34,11	67,1	√	√	√	√	Sampel (21)
38	SKLT	PT. Sekar Laut Tbk	96,5	24,5	√	√	X	√	
39	IIKP	PT. Inti Agri Resources Tbk	42,9	15,9	√	√	√	√	Sampel (22)

Berdasarkan data tabel sampel diatas penulis memperoleh sampel entitas yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2019-2020 sebanyak 39 entitas yang memenuhi kriteria yang telah disebutkan oleh peneliti sebelumnya dari a sampai dengan d, yang meliputi terpenuhinya kriteria “a” yang dimana perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2019-2020 dan untuk kriteria “b” terpenuhi yang dimana Perusahaan publik yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu dan perusahaan pasangannya yang *interest coverage ratio* tidak kurang dari satu, dengan tingkat aset dan dalam industri yang sama.

3.3 Lokasi dalam Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada galeri bursa efek indonesia dan menggunakan website *www.idx.co.id* kemudian menggumpulkan data penelitian dari setiap laporan keuangan yang terbit setiap periode dari tahun 2019-2020.

3.4 Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupada data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dalam bursa efek indonesia. Data tersebut berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan publik dalam *Indonesian Capital market Dictionary* (ICMD).

Laporan tahunan berisi informasi keuangan dan informasi non keuangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi perusahaan jika dilihat dari sisi kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja perusahaan diidentifikasi dengan baik untuk memastikan perbandingan yang wajar antara perusahaan dengan kesulitan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara keuangan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan data dokumentasi. Dokumentasi adalah penelitian arsip yang memuat kejadian masa lalu (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146). Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku, koran, majalah dan sebagainya.

3.6 Metode Analisis data

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap industri yang berpotensi terhadap tindakan manajemen laba.

3.6.1. Analisis Statistik deskriptif

Statistik deskriptif pada penelitian ini menggunakan dua aplikasi untuk mendapatkan informasi dari variabel baik maupun secara grafik. Aplikasi yang digunakan untuk mendeskripsikan grafik menggunakan aplikasi Microsoft excel sementara SPSS digunakan untuk menggambarkan profil data sampel yang meliputi antara lain mean, median, maksimum, minimum, dan deviasi standar. Data yang dikelompokkan pertumbuhan, manajemen laba dan kebijakan dividen.

3.6.2. Uji Teknis Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau

penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Yang nantinya akan dianalisa dengan bantuan program SPSS IBM 26.

Rumus regresi linear berganda yaitu dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Manajemen laba.

X1 = Jumlah komite audit.

X2 = Persentase komite audit independen.

X3 = Frekuensi pertemuan komite audit.

a = Konstanta (nilai Y apabila X= 0).

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan).

e = Koefisien *error*.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1. Uji normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi, variabel dependen (kebijakan dividen) dan variabel independen (pertumbuhan perusahaan dan manajemen laba) mempunyai distribusi yang normal atau sebaliknya.

Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus terdistribusi dengan normal yang distribusi datanya tidak menceng ke kiri maupun ke kanan. Pengujian normalitas dilakukan dengan melihat grafik normal. Kriteria pengujiannya sebagai berikut:

- a. **Jika angka signifikan $> 0,05$ maka data mempunyai distribusi normal.**
- b. **Jika angka signifikan $< 0,05$ maka data tidak mempunyai distribusi normal.**

3.7.2. Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel Independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika antara variabel independen saling berkorelasi, maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflationfactor* (VIF), nilai tolerane yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/tolerance$). suatu model regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai toleransi tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10.

3.7.3. Uji Heteroskedastistas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah jika *variance* dari residul satu pengamatan kesatu pemangatan lain berbeda disebut Heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dapat dilihat melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Apabila pola grafik ditunjukkan dengan titik - titik menyebar secara acak (tanpa pola

yang jelas) serta tersebar di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas pada model regresi.

3.7.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem autokorelasi* (Ghozali, 2005). Autokorelasi timbul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi dapat diketahui melalui uji *Durbin – Watson (DW test)*. Jika d lebih kecil dibandingkan dengan d1 atau lebih besar dari 4-d1, maka Ho ditolak yang berarti terdapat autokorelasi. Jika d terletak diantara du dan 4-du, maka Ho diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.

3.8 Pengujian Hipotesis

A. Uji signifikansi Parsial (Uji t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing masing variabel dependen. Untuk menguji koefisien ini penulis menggunakan data SPSS. Pada uji t nilai t_{hitung} akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Pertumbuhan Perusahaan dan Manajemen Laba (variabel independen) mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen (variabel dependen).
2. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Pertumbuhan Perusahaan dan Manajemen Laba (variabel independen) tidak mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen (variabel dependen).